

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- Abdul Kadir Muhammad , *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bayumedia Publishing, Bandung. 2004.
- Abdul Bari dan Makmur Amir, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2013.
- Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Rasail, Semarang. 2006.
- Ahmad Rifai, *Peran Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum choliiPreogratif*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia , Jakarta. 1985.
- Ansori Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung. 1990.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta. 1990.
- , *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 2011.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta. 2007.
- Cholisin, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, UNY Press, Yogyakarta, 2007.
- Janedjri M.Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta. 2012.
- , *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta. 2013.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang. 2006.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung. 2003.

- Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan, *Korupsi Pemilu di Indonesia, Indonesia Corruption Watch*, Jakarta. 2010.
- Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana (Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya)*, Laksbang Pressindi, Yogyakarta. 2016.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung. 2007.
- L.Sumartini, *Money Politics dalam Pemilu*, Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta. 2004.
- Muhamad Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. 2015.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2010.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung. 2006.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. 2006.
- Nur Hidayat Sardani, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta. 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009.
- Subekti., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta. 2001.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto FH UNDIP, Semarang. 1990.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty., Yogyakarta. 2000.
- Suharizal, *Pemilukada*, PT Raja Grafindo, Jakarta. 2012.
- Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta. 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta. 1984.
- , *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. 2012.

- Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor. 2006.
- Syarif Mappiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenada Media Grup, Jakarta. 2015.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta. 2010.
- Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, PT Mizan Publika, Bandung. 2015.
- Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi*, Murai Kencana, Jakarta. 2004.
- , *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta. 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. 2008.
- Zainuddin Ali, *Metode Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2010.
- Zuly Qodir, *Teori dan Praktik Politik di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2016.

2. Sumber Jurnal

- Amarru Muftie Holish, Rohmat, Iqbal Syarifudin, *Money Politic dalam Praktik Demokrasi Indonesia*, Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, Universitas Negeri Semarang.
- Dewi Permatasari Sulistyoningsih, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pidana Pemilu*, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Juli-November 2015.
- Johny Lomulus, "Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Langsung di Kota Bitung dalam Demokrasi Mati Suri", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 4, No. 1, 2007, LIPI.
- Ria Cassmi Arrsa, "Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, No.3, September 2014, PPOTODA Universitas Brawijaya.
- Sri Wahyu Ananingsih, "Tantangan dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017", *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 1, Januari 2016, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

3. Sumber Media Elektronik

Dobrzynska Agnieszka, *Enforcement of Electoral Integrity*. <http://aceproject.org/aceen/topics/> diakses pada Hari Sabtu 30 Agustus 2019, 07.43 WIB.

<http://jimly.com/> / Jimly Asshiddiqie, *Artikel Penegakan Hukum.pdf*, diakses pada Hari Kamis 28 Februari 2019 Pukul 02:38 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/selain>, diakses Pada Hari Sabtu 31 Agustus 2019, Jam 02.27 WIB.

<http://mediaindonesia.com>, *Calon Wakil Walikota Pangkalpinang Jadi Tersangka Politik Uang*, diakses Pada Hari Kamis 28 Februari 2019, Pukul 01.35 WIB

<https://wowbabel.com>, *Putuskan Dodot Bebas dari Dakwaan*, diakses Pada Hari Kamis 28 Februari 2019, Pukul 01.35 WIB

Susilo Bambang Yudhoyono *Politik Uang Rusak Demokrasi*, ICW, <http://www.antikorupsi.org/new/index.php> diakses pada Hari Rabu 21 Agustus 2019 Pukul 01.00 WIB

4. Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP))

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

5. Sumber Wawancara

BRIPKA Ariansyah, Anggota Unit Tindak Pidana Korupsi, Kepolisian Resor Pangkalpinang, pada tanggal 18 Juli 2019.

Iwan Gunawan S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 18 Juli 2019.

Erwin,S.H.,M.H, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, pada tanggal 23 Juli 2019.

Dr. Naisyah Kadir,S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada tanggal 23 Juli 2019.

Novrian Saputra,S.E, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Bawaslu Pangkalpinang pada tanggal 8 Juli 2019.

